

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Abdul Latief Fathoni

NPP. 32.0495

Asdaf Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: latiefoni@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The problem in this study is the existence of obstacles that hinder the optimization of the stunting reduction acceleration program in Lamongan Regency..

Purpose: The purpose of this research is to analyze the role of the Regional Government of Lamongan Regency in accelerating the reduction of stunting. **Method:** This research employs a descriptive qualitative method and is analyzed using Mintzberg's theory. Data collection techniques include in-depth interviews with 12 informants and document analysis. **Result:** The findings indicate that the Lamongan Regency Government plays a strategic role through the establishment of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), cross-sectoral involvement, identification of families at risk of stunting, nutrition education, and the issuance of Regent Regulation Number 60 of 2023 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. Supporting factors include strong leadership commitment, inter-agency synergy, and community participation. On the other hand, inhibiting factors include limited human resources and low public understanding of nutrition and sanitation. **Conclusion:** The Lamongan Regency Government plays a vital role in accelerating stunting reduction through collaborative and regulatory strategies supported by leadership commitment and community participation, despite facing challenges in human resources and public awareness.

Keywords: Role of Local Government, Stunting, Stunting Prevalence

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masalah pada penelitian ini adalah masih adanya kendala yang menghambat optimalisasi program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lamongan.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam percepatan penurunan *stunting*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dianalisis menurut Teori Mintzberg. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (12 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menjalankan peran melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dan pelibatan lintas sektor; melalui pendataan keluarga berisiko *stunting* dan edukasi gizi; serta melalui penerbitan regulasi berupa Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan daerah, sinergi antar instansi, dan partisipasi masyarakat. Serta, faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai gizi dan sanitasi. **Kesimpulan:** Pemerintah Kabupaten Lamongan menjalankan peran vital dalam percepatan penurunan *stunting* melalui

pembentukan TPPS, pelibatan lintas sektor, pendataan dan edukasi gizi, serta regulasi, dengan dukungan komitmen pimpinan, sinergi instansi, dan partisipasi masyarakat, meski masih dihadapkan pada keterbatasan SDM dan pemahaman masyarakat.

Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, *Stunting*, Prevalensi *Stunting*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global, terutama di negara berkembang dan berpenghasilan rendah. Kondisi ini ditandai dengan perawakan pendek, daya tahan tubuh yang lemah, serta gangguan kognitif akibat kekurangan gizi kronis selama 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa pembuahan hingga anak berusia dua tahun (Fazid et al., 2024; Kesgin et al., 2024; Lopuhaa & Ginting, 2024; Saaka et al., 2021). Kurangnya asupan nutrisi, infeksi berulang, dan stimulasi perkembangan yang tidak memadai menjadi faktor utama penyebab *stunting* (Supriyanto & Rahman, 2023; Wigati & Ciptanurani, 2023). Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* nasional di Indonesia mengalami penurunan dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu maksimal 20%. Untuk mencapai target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 18,8% pada tahun 2025, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan dan strategi, termasuk pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat nasional hingga desa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 (Kemenkes, 2023).

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu lokasi prioritas intervensi pencegahan *stunting* terintegrasi tahun 2025, dengan prevalensi *stunting* sebesar 17,7% pada tahun 2023. Di antara kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan menunjukkan penurunan prevalensi *stunting* yang sangat signifikan, yaitu dari 27,5% pada tahun 2022 menjadi 9,4% pada tahun 2023 (TPPS Provinsi Jawa Timur, 2024). Penurunan drastis ini menarik perhatian untuk dilakukan kajian mendalam terhadap peran pemerintah daerah dalam percepatan penurunan *stunting*, karena pemerintah daerah memiliki andil yang cukup besar dalam melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat daerah (Labolo Muhadam, 2014).

Beberapa faktor yang menyebabkan *stunting* di Kabupaten Lamongan antara lain kurangnya asupan gizi yang memadai pada ibu hamil dan anak balita, pola asuh yang kurang tepat, serta kualitas air dan sanitasi yang belum optimal. Pemerintah Kabupaten Lamongan menanggapi hal ini dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, serta mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mengatur pelaksanaan program kesehatan dan gizi secara lokal.

Meskipun keberhasilan penurunan angka *stunting* cukup signifikan, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi program, seperti keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pelaksana dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan pola asuh yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam mempercepat penurunan *stunting*, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun kesenjangan masalah yang diambil peneliti adalah meskipun Kabupaten Lamongan berhasil menunjukkan capaian signifikan dalam penurunan prevalensi *stunting* dari 27,5% pada tahun 2022 menjadi 9,4% pada tahun 2023, keberhasilan ini belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas program secara menyeluruh. Terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara capaian statistik dan

kondisi implementatif di lapangan. Beberapa faktor penghambat utama yang masih dijumpai meliputi keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pelaksana, baik dari segi jumlah maupun kualitas, serta rendahnya tingkat literasi gizi dan pemahaman masyarakat mengenai pola asuh yang tepat. Selain itu, meskipun pemerintah daerah telah mengadopsi kebijakan yang komprehensif, termasuk pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dan pengesahan regulasi melalui Peraturan Bupati, keterlibatan masyarakat secara substansial belum optimal.

Intervensi gizi spesifik dan sensitif yang telah dirancang masih menghadapi tantangan dalam hal internalisasi nilai dan praktik di tingkat keluarga, terutama di kalangan keluarga berisiko tinggi. Kesenjangan ini menandakan bahwa keberhasilan teknokratik dalam menurunkan angka *stunting* belum sepenuhnya diimbangi oleh penguatan kapasitas pelaksana dan perubahan perilaku masyarakat yang berkelanjutan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif dalam tata kelola program *stunting* di tingkat daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian pada peran pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting*. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, penelitian sebelumnya yang pertama, penulis mengambil acuan dari penelitian Ana Zahara, Aruni, Eka Chyntia (Zahara et al., 2023), menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memiliki peran yang penting dalam menangani kasus *stunting* melalui sosialisasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara khususnya telah melakukan sosialisasi terhadap berbagai posyandu di desa-desa. *Jurnal Riview Pendidikan dan Pengajaran Volume 7 Nomor 3 tahun 2024*, penulis mengambil acuan dari penelitian Ira Safitri, Sri Susanti, Muthia Ivana, dan Julia Ivanna (Safitri et al., 2024), penelitian ini menunjukkan peran pemerintah desa dalam pembentukan Tim Dapur Sehat (Dashat) untuk mencegah dan menurunkan *stunting* di Desa Denai Kuala terealisasi melalui kolaborasi dengan Universitas Negeri Medan dan pihak terkait lainnya, yang memproduksi makanan sehat dengan gizi tinggi untuk anak-anak yang terkena *stunting* sebagai langkah penurunan *stunting*, dan sebagai langkah pencegahan bagi anak-anak yang belum terkena *stunting*. *Jurnal Hukum Sehasen, Volume 9 tahun 2023, halaman 175-182*, penelitian Maaruf Adlina dan Irwan Triadi (Maaruf & Triadi, 2023) menunjukkan bahwa akan sulit mempertahankan kedaulatan negara jika kondisi generasi penerus bangsa mengalami rendahnya kemampuan belajar dan memiliki risiko terserang penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas dikarenakan gizi yang buruk atau *stunting*, *Jurnal Dinamika Pemerintahan, Volume 6 Nomor 1 (Januari 2023)*. Artikel ini berjudul Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Rokan Hulu yang ditulis oleh Amir Syamsuadi, Ade Febriani, Ermayani, Bubung Bunyamin, dan Nursyiamah (Syamsuadi et al., 2023), penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan upaya penurunan *stunting* secara terstruktur dan menyeluruh seperti melakukan identifikasi sebaran *stunting*, melakukan ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyelenggarakan rembuk *stunting*. Penelitian terdahulu yang terakhir merujuk pada *Jurnal Indonesian Asscociation for Public Administration* (2024), halaman 83-106. Artikel ini berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Lais yang ditulis oleh Trecy Austin, Febby Shamudra, dan Arif Rahman Hakim (Austin et al., 2024), penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam melibatkan berbagai sektor seperti Dinas Kesehatan Musi Banyuasin bagian Kesga dan Gizi Masyarakat, Puskesmas di wilayah Kecamatan Lais dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, dimana puskesmas berperan penting dalam penyampaian informasi tentang bahaya *stunting*.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Adapun gap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu, perbedaan ruang lingkup lokasi dimana penelitian yang dilakukan dalam ruang lingkup kabupaten dan tidak hanya terfokus pada satu program percepatan penurunan *stunting*. Adapun persamaan terletak pada teori Peran Mintzberg yang digunakan pada artikel Jurnal *Indonesian Association for Public Administration* (2024), halaman 83-106 yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Lais yang ditulis oleh Treacy Austin, Febby Shamudra, dan Arif Rahman Hakim yang juga digunakan pada penelitian ini, meskipun menggunakan teori yang sama penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki ruang lingkup yang lebih luas yaitu setingkat kabupaten.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lamongan, untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan faktor penghambat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lamongan, dan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan faktor pendukung peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lamongan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti memiliki fokus yang mendalam terhadap fenomena sosial melalui perspektif subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, ataupun dokumentasi kemudian dideskripsikan secara jelas untuk memahami peristiwa yang diteliti (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian kualitatif hanya bisa dilaksanakan di luar laboratorium sehingga bersifat alami dan berdasar kejadian natural di lapangan (Abdussamad, 2021).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Bupati Kabupaten Lamongan, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Anggota Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan (1 orang), Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, dan Ibu Lulusan Sekolah Orang Tua Hebat (5 orang).

Adapun analisisnya menggunakan aplikasi Nvivo yang mendukung penelitian kualitatif dirancang sedemikian rupa untuk membantu pengguna mengatur, menganalisis, dan mengemukakan wawasan dalam data tidak terstruktur. Nvivo menyediakan berbagai metode penelitian dan dapat digunakan untuk mengatur semua data penelitian dalam satu wadah atau tempat, membuat tempat untuk sumber materi, memberi kode pada data sumber sesuai topik, memberi kode cepat, mencatat ide dan pengamatan, membuat model konsep berdasarkan data, dan membuat tampilan laporan (Wahid et al., 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lamongan menggunakan Teori Peran Mintzberg (Mintzberg, 1973) yang memiliki tiga dimensi yaitu, peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Peran Interpersonal

Peran interpersonal yang dimaksud mencakup kemampuan pemimpin daerah, khususnya Bupati, dalam membangun koordinasi lintas sektor, menjalin komunikasi dengan masyarakat, serta memberikan keteladanan dalam pelaksanaan kebijakan. Kepemimpinan yang kuat dari Bupati Lamongan menjadi penggerak utama dalam mengintegrasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), *stakeholder*, serta masyarakat agar memiliki visi dan aksi yang selaras dalam menangani masalah *stunting*. *Stunting* merupakan masalah kronis yang memerlukan penanganan jangka panjang dan kolaboratif. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak menjadi hal mutlak. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara aktif melaksanakan forum rembuk *stunting* setiap tahun guna memetakan wilayah rawan *stunting* serta merumuskan program intervensi yang tepat, seperti pemberian makanan tambahan bagi keluarga yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjalankan berbagai bentuk dukungan, baik berupa konsultasi langsung maupun daring, pemberdayaan kader posyandu, pembinaan kelembagaan desa, hingga penyediaan insentif dan sarana pendukung program *stunting*.

Dalam konteks ini, Bupati berperan sebagai figur utama yang mampu mendorong kolaborasi dan sinergi antar sektor, termasuk dengan akademisi, organisasi profesi seperti IDI, serta sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Komitmen kepemimpinan ini ditopang oleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat, seperti pemberian insentif fiskal, turut memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menjalankan program secara berkelanjutan dan terstruktur. Peran interpersonal dalam konteks ini menjadi instrumen penting untuk membangun jejaring kerja yang adaptif dan inklusif dalam rangka mengatasi permasalahan gizi kronis di Kabupaten Lamongan.

3.2. Peran Informasional

Peran informasional pemerintah daerah dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lamongan tercermin dari bagaimana pemerintah daerah mampu mengakses, mengolah, dan menyebarkan informasi yang relevan terkait kondisi *stunting* di setiap wilayah administratif. Penguasaan informasi tersebut menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program secara berkala. Salah satu bentuk konkret dari fungsi ini adalah pelaksanaan pemantauan dan pelaporan secara rutin terhadap kondisi balita dan ibu hamil melalui sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Data yang terekam tidak hanya menggambarkan situasi terkini di tingkat kabupaten, tetapi juga memungkinkan analisis hingga ke tingkat desa. Monitoring yang dilakukan secara menyeluruh oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di semua tingkatan, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten, menunjukkan adanya mekanisme koordinasi informasi yang efektif. Setiap bulan, dilakukan pelaporan progres program, mini lokakarya, serta penyampaian capaian yang kemudian menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr. Hilda, yang menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui jalur resmi yang memungkinkan pelaporan berjalan sistematis dan akuntabel.

Salah satu hasil dari pengelolaan informasi yang baik tersebut adalah penetapan desa-desa

prioritas *stunting* berdasarkan tingkat prevalensi, jumlah kasus, dan risiko lainnya seperti kemiskinan dan sanitasi. Melalui data yang dikompilasi, pemerintah daerah dapat menentukan daerah yang perlu mendapatkan intervensi lebih intensif, baik dari segi gizi, edukasi, maupun pembangunan sarana prasarana. Tidak hanya mengandalkan laporan kuantitatif, pemantauan juga dilakukan secara langsung oleh pejabat daerah seperti Sekretaris Daerah yang turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi alat-alat pendukung program, seperti timbangan yang sudah tidak layak pakai.

Sebagai pusat informasi dan penyebar utama, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memanfaatkan peran komunikatifnya untuk menyampaikan pesan-pesan strategis kepada publik. Melalui berbagai kanal dan kegiatan, informasi mengenai pola asuh, kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya gizi seimbang disampaikan secara masif. Salah satu strategi informatif ini tampak dalam program edukasi seperti aksi serentak pencegahan *stunting*, edukasi kepada calon pengantin, serta pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang dari tingkat remaja hingga masa kelahiran anak, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Tidak hanya itu, bentuk edukasi lain diwujudkan melalui program *Sekolah Orang Tua Hebat*, sebagai sarana bagi orang tua untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pola asuh dan pemberian makanan bergizi. Program ini dilengkapi dengan sosialisasi kepada kader dan camat melalui pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk TP PKK, sehingga distribusi informasi bisa menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan juga memainkan perannya sebagai pembicara dan representatif formal dalam menjalin kemitraan strategis. Pemerintah menjadi penghubung dengan dunia usaha, akademisi, serta relawan yang memiliki potensi untuk mendukung program percepatan penurunan *stunting*, baik melalui dana maupun tenaga. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi intervensi, pemerintah daerah menyampaikan perkembangan program, tantangan yang dihadapi, serta upaya korektif yang akan dilakukan. Evaluasi ini tidak hanya mencerminkan akuntabilitas tetapi juga memperkuat kapabilitas pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

3.3. Peran Pengambilan Keputusan

Peran pengambilan keputusan meliputi fungsi sebagai inisiator, penanganan gangguan, pengalokasi sumber daya, serta negosiator. Keempat peran tersebut tampak dalam kebijakan dan langkah strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam mempercepat penurunan *stunting*. Sebagai inisiator, pemerintah daerah menunjukkan komitmen dan kreativitas tinggi dalam merancang program-program inovatif. Salah satu contoh konkret adalah program “1-10-100” hasil kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan TP PKK Kabupaten Lamongan, di mana satu paket makan siang diberikan kepada sepuluh anak *stunting* selama seratus hari berturut-turut, dengan harapan terjadi peningkatan berat dan tinggi badan. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Daerah Lamongan mampu menciptakan solusi yang kontekstual dan aplikatif dalam menangani permasalahan *stunting*. Selain itu, pemerintah juga mendorong seluruh OPD untuk melahirkan program-program inovatif lainnya seperti Ferrameg, yaitu pemberian tablet Fe kepada remaja putri setiap hari Rabu, dan Gerai Sahdu, yaitu Gerakan Anak Ibu Senang Hadir ke Posyandu.

Peran sebagai penanganan gangguan juga dijalankan pemerintah daerah dengan sigap, terutama dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu tantangan yang ditemukan bukan semata-mata pada aspek ekonomi, melainkan pada pola asuh dan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pemenuhan gizi anak. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Lamongan membentuk program “Sekolah Orang Tua Hebat” yang bertujuan untuk memberikan edukasi pengasuhan, serta memperkuat layanan dan edukasi di posyandu. Selain itu, pemerintah juga responsif terhadap kendala teknis seperti gangguan sistem pelaporan aplikasi, yang diatasi dengan membuka kanal pelaporan manual dan link alternatif.

Ketika ditemukan banyak alat antropometri seperti timbangan yang tidak layak pakai, pemerintah langsung melakukan intervensi melalui pengadaan alat yang lebih akurat, menunjukkan komitmen dalam menjaga akurasi data dan efektivitas program.

Adapun pemerintah daerah memaksimalkan berbagai aset dan kapasitas yang dimiliki untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*. Berbagai bentuk dukungan diwujudkan melalui pengadaan mobil sehat untuk 474 desa/kelurahan, sepeda untuk 5.247 kader posyandu, serta insentif kader senilai lebih dari dua miliar rupiah. Pemerintah juga melaksanakan pelatihan kader, seperti pelatihan Kelas Ibu Hamil, pelatihan pengukuran antropometri, pengisian Sistem Informasi Puskesmas (SIP), dan pelatihan Emo Demo. Bahkan, dalam program makanan tambahan (PMT), pemda memanfaatkan potensi lokal seperti penggunaan ikan di wilayah utara dan telur di wilayah selatan, sehingga program lebih berkelanjutan dan memberdayakan ekonomi lokal.

Bupati Lamongan dan jajaran pemerintah daerah menunjukkan kemampuan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Pendanaan program 1-10-100, misalnya, tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari relawan “orang tua asuh” yang secara sukarela memberikan dukungan finansial. Program ini berhasil menggalang dana hampir satu miliar rupiah dan memberi dampak signifikan terhadap penurunan angka *stunting*. Pemerintah juga membangun kolaborasi dengan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan berbagai lembaga masyarakat, yang berkontribusi pada penguatan jejaring dan kesinambungan program. Seluruh tindakan ini mencerminkan bagaimana pemerintah daerah Lamongan tidak hanya mengambil keputusan secara mandiri, tetapi juga mampu memberdayakan aktor-aktor lain demi tercapainya tujuan bersama dalam menurunkan angka *stunting* secara efektif dan berkelanjutan.

3.4. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lamongan

Faktor penghambat merupakan berbagai gangguan atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa pelaksanaan program menghadapi hambatan baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketidakpercayaan orang tua terhadap pola asuh yang telah diedukasi oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan posyandu maupun kader PKK di tingkat desa. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Bapak Drs. Moh. Nalikan, M.M., dalam wawancara pada tanggal 23 Desember 2024, menyatakan bahwa permasalahan *stunting* tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi, melainkan lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terkait *stunting* serta pola asuh yang kurang tepat. Bahkan ditemukan kasus di mana keluarga dengan ekonomi mencukupi justru mengabaikan aspek gizi anak, sehingga menyebabkan anak mengalami *stunting*. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, dr. Nur Indra Tsani Husaini, pada tanggal 16 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa tantangan utama dalam penanganan *stunting* berasal dari pola asuh orang tua, khususnya dalam hal pemberian makanan bergizi kepada anak yang sering kali mengalami hambatan karena anak-anak merasa bosan terhadap makanan yang diberikan.

Sementara itu, dari sisi internal, hambatan juga ditemukan dalam implementasi program strategis pemerintah daerah, salah satunya adalah program 1-10-100. Program ini sangat bergantung pada dukungan pihak ketiga sebagai orang tua asuh yang memberikan pembiayaan terhadap penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak *stunting* selama 100 hari. Dalam wawancara pada tanggal 24 Januari 2025, anggota Pokja IV TP PKK Kabupaten Lamongan, Mbak Adi, menjelaskan bahwa terdapat berbagai kendala teknis di lapangan, seperti tidak adanya pihak yang bersedia memasak makanan, orang tua yang enggan mengikuti program, menolak penyuluhan, atau bahkan menolak konsumsi makanan yang telah disediakan. Ketergantungan program pada donasi dan ketersediaan relawan

menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak berkelanjutan. Program 1-10-100 terakhir kali berjalan pada bulan September 2023, dan sejak itu belum dilanjutkan karena keterbatasan dukungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dan keberlanjutan pendanaan menjadi faktor krusial yang masih belum optimal dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lamongan.

3.5. Faktor Pendukung Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lamongan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menurunkan prevalensi *stunting* secara signifikan dari 27,05% pada tahun 2022 menjadi 9,4% pada tahun 2023 tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan peran pemerintah daerah. Capaian ini mencerminkan adanya kerja kolaboratif yang kuat, sistematis, serta dukungan dari berbagai elemen yang terlibat, baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, pemanfaatan sumber daya lokal menjadi strategi efektif yang diterapkan dalam penyediaan makanan tambahan bergizi bagi balita *stunting*. Pendekatan ini menitikberatkan pada optimalisasi potensi lokal tanpa bergantung pada bahan pangan dari luar daerah, sehingga dapat menekan biaya sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, dr. Nur Indra Tsani Husaini, dalam wawancara tanggal 16 Januari 2025, menyampaikan bahwa pemanfaatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal dilakukan dengan menyesuaikan potensi masing-masing wilayah, seperti ikan di wilayah utara dan telur ayam atau bebek di wilayah selatan. Pendekatan ini tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi lokal dalam upaya penurunan *stunting*.

Sementara itu, dari sisi internal, komitmen kuat kepala daerah menjadi kunci keberhasilan program percepatan penurunan *stunting*. Kepala daerah berperan aktif dalam mengoordinasikan dan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak secara sinergis serta melibatkan sektor swasta, melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), dan dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal ini disampaikan oleh dr. Nur Indra Tsani Husaini dalam pernyataannya bahwa kepemimpinan kepala daerah mampu menekan semua unsur untuk terlibat aktif dalam penanganan *stunting*. Selain itu, dukungan konkret dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan juga turut memperkuat pelaksanaan program, seperti pemberian bantuan mobil sehat ke seluruh desa/kelurahan (474 unit), sepeda kader (5.247 unit), insentif kader dengan total anggaran Rp2.273.700.000, bantuan alat permainan edukatif, serta berbagai pelatihan bagi kader posyandu seperti Komunikasi Antar Pribadi (KAP), pengukuran antropometri, pengisian Sistem Informasi Posyandu (SIP), dan Emo Demo. Semua dukungan tersebut menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas dan motivasi para pelaksana di lapangan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam percepatan penurunan *stunting* sejalan dengan temuan-temuan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam penanganan *stunting* melalui berbagai pendekatan kolaboratif dan terstruktur. Sebagaimana yang ditemukan oleh (Zahara et al., 2023) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap posyandu di desa-desa menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting*. Hal ini selaras dengan peran informasional yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyebarkan informasi dan edukasi melalui berbagai kanal serta sistem pelaporan yang terintegrasi. Demikian pula, (Safitri et al., 2024) menemukan bahwa kolaborasi pemerintah desa dengan universitas dan pihak terkait dalam pembentukan Tim Dapur Sehat merupakan strategi inovatif untuk penanganan *stunting* di Desa Denai

Kuala. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya inovasi dan kemitraan dalam pengambilan keputusan, sebagaimana Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan program-program inovatif seperti “1-10-100” dan melibatkan sektor swasta melalui CSR serta relawan dalam mendukung program penurunan *stunting*.

Temuan dari (Syamsuadi et al., 2023) di Kabupaten Rokan Hulu juga menunjukkan kesamaan dengan penelitian ini terkait upaya pemerintah melakukan identifikasi wilayah rawan *stunting*, penyusunan rencana kegiatan, serta pelaksanaan rembuk *stunting* sebagai mekanisme konvergensi intervensi gizi yang terintegrasi. Hal ini memperkuat bukti bahwa koordinasi lintas sektor dan peran aktif pemerintah daerah dalam menyelenggarakan forum-forum kolaboratif menjadi faktor penting keberhasilan penurunan *stunting*. Sementara itu, penelitian (Austin et al., 2024) menyoroti peran penting puskesmas dalam penyampaian informasi kesehatan di Kecamatan Lais, yang menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan *stunting*. Hal ini menguatkan temuan peran informasional di Kabupaten Lamongan yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan hingga unit pelayanan kesehatan untuk mendukung pemantauan dan edukasi gizi.

Berbeda dengan (Maaruf & Triadi, 2023) yang lebih menekankan pada dampak jangka panjang *stunting* terhadap kemampuan generasi penerus bangsa dan kedaulatan negara, penelitian ini lebih fokus pada dimensi peran pemerintah daerah secara praktis dalam pelaksanaan program dan kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Meski demikian, keduanya sama-sama menegaskan urgensi intervensi gizi yang komprehensif untuk masa depan bangsa. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat temuan bahwa keberhasilan percepatan penurunan *stunting* memerlukan peran pemerintah daerah yang proaktif, koordinatif, dan inovatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta pengelolaan informasi yang efektif. Namun, tantangan terkait ketidakpercayaan pola asuh dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat yang masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam percepatan penurunan *stunting* cukup baik mencakup fungsi kepemimpinan, komunikasi, inovasi program, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Faktor pendukung utama adalah kepemimpinan Bupati dan pemanfaatan sumber daya lokal, sementara kendala utama berasal dari keterbatasan anggaran dimana adanya ketergantungan program 1-10-100 pada dukungan pihak ketiga seperti donatur dan relawan, kendala teknis di lapangan seperti tidak tersedianya pihak yang bersedia memasak makanan, penolakan dari orang tua terhadap program, penyuluhan, dan makanan yang disediakan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan yang menyebabkan program tidak berjalan secara berkelanjutan. Adapun kendala lain yaitu, resistensi masyarakat terhadap edukasi pola asuh dimana kurangnya kepercayaan orang tua terhadap edukasi pola asuh yang diberikan oleh posyandu dan kader PKK, sehingga menyebabkan pengetahuan akan pola asuh dan pola gizi bagi balita *stunting* masih rendah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan sebagian besar berasal dari wawancara dan dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga terdapat kemungkinan bias informasi dari sumber yang terbatas. Kedua, penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada satu wilayah kabupaten sehingga hasilnya mungkin kurang dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik berbeda. Ketiga, kendala waktu dan akses terhadap beberapa informan kunci membatasi kedalaman pengumpulan data, khususnya terkait faktor internal yang memengaruhi pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian,

untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dimensi lain yang belum dibahas dalam penelitian ini guna mendapatkan perspektif yang lebih luas serta mempertimbangkan dinamika kebijakan terbaru yang dapat memengaruhi hasil penelitian

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Pertama)*. Syakir Media Press.
- Austin, T., Shamudra, F., & Rahman Hakim, A. (2024). Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais. *Iapa Proceedings Conference*, 83. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1045>
- Fazid, S., Haq, Z. U., Gillani, B. H., Khan, A. J., Khan, M. N., Khan, A., Garzon, C., Habib, I., Tanimoune, M., Ihtesham, Y., & Heald, A. H. (2024). Effectiveness of locally produced ready-to-use supplementary foods on the prevention of stunting in children aged 6-23 months: A community-based trial from Pakistan. *British Journal of Nutrition*, 131(7), 1189–1195. <https://doi.org/10.1017/S0007114523002702>
- Kemendes. (2023). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. <https://ayosehat.kemendes.go.id/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244#:~:text=Secara jumlah yang paling banyak penurunan angka stunting,Jawa Timur%2C Jawa Tengah%2C Sumatera Utara%2C dan Banten.>
- Kesgin, M. A., Saraç, M., Grede, N., Bircan, A. Ç., & Koç, İ. (2024). Impact of financial assistance on stunting: Syrian refugee children under 5 in Türkiye. *Journal of Biosocial Science*, March 2011, 639–665. <https://doi.org/10.1017/S0021932024000038>
- Labolo Muhadam. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In *Raja Grafindo Persada* (p. 248).
- Lopuhaa, H. M., & Ginting, A. H. (2024). Empowerment of PKK members for reducing stunting in the Tasikmalaya City. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 5(3), 191–201. <https://doi.org/10.35912/joste.v5i3.1743>
- Maaruf, N. A., & Triadi, I. (2023). Analysis of The Government's Role in Implementing Presidential Regulation (PERPRES) Number 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction in Efforts to Maintain National Resilience. *JURNAL HUKUM SEHASSEN*, 9(2), 175–182. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4857>
- Mintzberg, H. (1973). *The Nature of Managerial Work*. Harper & Row.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial Plus. In *Media Sahabat Cendekia*.
- Saaka, M., Saapiire, F. N., & Dogoli, R. N. (2021). Independent and joint contribution of inappropriate complementary feeding and poor water, sanitation and hygiene (WASH) practices to stunted child growth. *Journal of Nutritional Science*, 10, 1–10. <https://doi.org/10.1017/jns.2021.103>
- Safitri, I., Susanti, S., Zahra, M. I., & Ivanna, J. (2024). Peran Pemerintah Desa Melalui Pembentukan Tim Dapur Sehat (DASHAT) Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Desa Denai Kuala Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Riview Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(April), 7871–7875. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Supriyanto, H., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan

- Salem Kabupaten Brebes. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 241–254. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.177>
- Syamsuadi, A., Febriani, A., Ermayani, E., Bunyamin, B., & Nursyamah, N. (2023). Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6(1), 1–30. <https://doi.org/10.36341/jdp.v6i1.3204>
- TPPS Provinsi Jawa Timur. (2024). *Laporan semester 1 2024*. https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/assets/uploads/laporan_pro/laporan_pro_35_periode_6_1721046658.pdf#:~:text=Gambar 2 Grafik Tren Prevalensi Stunting SSGI 2021 – 2022,
- Wahid, S. H., Kususiyanah, A., Sirait, W. Y., & Umbar, K. (2022). *Analisis Data Kualitatif Menggunakan Nvivo* (Pertama). Publica Indonesia Utama.
- Wigati, M., & Ciptanurani, C. (2023). Policy Triangle Analysis of Stunting Issues in Urban Areas: A Case Study of Yogyakarta City. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 27(2), 144. <https://doi.org/10.22146/jkap.86489>
- Zahara, A., Aruni, F., & Chyntia, E. (2023). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Dan Menangani Penurunan Kasus Stunting Di Kabupaten Aceh Utara. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 9(2), 222–230. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i2.183>

